

RENDAHNYA TINGKAT PELAYANAN AIR BERSIH BAGI MASYARAKAT (*baca : MASYARAKAT MISKIN*) KOTA SEMARANG

M. Deby Rizani

Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sultan Fatah (UNISFAT)
Jl. Sultan Fatah No. 83 Demak Telpn (0291) 681024

Abstrak: Ada masyarakat yang kesulitan memperoleh air bersih untuk kehidupan sehari-hari, sementara di sisi lain terdapat penggunaan air secara berlebihan tanpa memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang. Aksesibilitas air bersih bagi masyarakat miskin adalah salah satu indikator pada pasokan air dan sistem pelayanan air bersih di kota Semarang. Ada tiga tingkat aksesibilitas air bersih yaitu aksesibilitas rendah, aksesibilitas menengah dan aksesibilitas tinggi. Aksesibilitas air bagi masyarakat miskin di Semarang adalah aksesibilitas menengah. Tetapi masyarakat harus menghabiskan 5% dari pendapatan setiap bulan untuk mendapatkan air bersih. Situasi ini sangatlah buruk, dimana standarisasi aksesibilitas air yang seharusnya tidak menghabiskan lebih dari 3% dari pendapatan setiap bulan.

Kata kunci : Aksesibilitas air, orang miskin, Kota Semarang

PENDAHULUAN

Air sebagai unsur penting kehidupan menjadi permasalahan dalam ketersediannya di alam ini. Ketersediaan air yang digunakan yaitu air tawar sangatlah kecil dibandingkan air laut yang melimpah. Air tawar yang hanya 3% saja dari keseluruhan air di bumi masih dibagi-bagi lagi menurut letaknya. Air permukaan yaitu air sungai dan air danau merupakan bagian kecil dari air tawar. Air tanah yang setiap saat diambil, dieksploitasi manusia, dimanfaatkan secara maksimal ternyata jumlahnya sangat kecil. Untuk mengatasi jumlah air yang terbatas diperlukan teknologi perubahan air asin ke air tawar. Walaupun teknologi ini sudah berjalan tetapi belum secara maksimal dapat menutup kekurangan air

di bumi karena teknologi ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Evolusi sektor air di negara-negara berkembang menunjukkan kemajuan yang sama, mulai dari penerapan teknologi rumah tangga hingga setingkat metropolitan. Hal ini membuktikan tidak ada teknologi yang tepat diterapkan pada sektor ini. Sehingga diperlukan pendekatan yang menawarkan sejumlah teknik, finansial, dan institusional yang menyesuaikan keadaan sosial ekonomi penduduk yang dilayani dan dapat ditingkatkan apabila dikehendaki oleh perubahan keadaan. Keadaan yang dimaksud adalah lebih kepada partisipasi penduduk, dalam hal ini masyarakat yang dilayani. Hal ini menyangkut ide dan gagasan mereka serta keinginan untuk merubah suatu sistem penyediaan air bersih. Ada tiga

prinsip yang mendasari pembangunan dalam sektor air bersih, yaitu;

(a) Konservasi.

Ini berarti menggunakan air hanya secukupnya saja untuk memenuhi kebutuhan yang senyatanya, tanpa pemborosan. Konservasi yang efektif biasanya meliputi suatu paket langkah pengendalian kebocoran, penggunaan peralatan untuk penghematan air, tarif yang berdaya mencegah pemborosan, dan kampanye untuk mendorong konsumen lebih sadar terhadap akibat penggunaan yang boros.

(b) Ketahanan.

Ini berarti penggunaan teknologi dan sistem yang selalu siap bekerja dengan sumber-sumber daya yang dapat diperoleh dari lingkungan masyarakat yang dilayani, tanpa ketergantungan yang berlebih pada masukan dari luar. Sumber daya ini meliputi tidak saja keuangan, melainkan juga mengelola sistem dan ketrampilan yang diperlukan untuk merawat dan memperbaiki peralatan yang telah dipasang. Ketahanan juga meliputi peduli terhadap keberterimaan (yaitu menggunakan sistem air minum dan sanitasi yang disenangi masyarakat) dan juga peduli terhadap partisipasi masyarakat (dalam memilih teknologi yang akan diterapkan dan dalam menentukan cara

mengelolanya, demikian juga dalam perencanaan, konstruksi, manajemen, dan operasi dan pemeliharaan yang tepat). Sistem yang tidak mampu berjalan atau yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat yang seharusnya dilayani merupakan penyalahgunaan investasi sumberdaya.

(c) Sistem Melingkar (*Circular System*).

Dengan meningkatnya tekanan jumlah penduduk terhadap sumber-sumber daya yang terbatas, maka kita perlu memikirkan sistem melingkar, bukan garis lurus. Kota yang membuang polusinya ke saluran air dan menyebabkan masalah bagi orang lain tidak bisa diterima lagi. Sebaliknya, air limbah yang telah diolah seharusnya dianggap sebagai suatu sumber bernilai yang dapat dipakai.

TINJAUAN PUSTAKA

PRINSIP KELAYAKAN PELAYANAN DALAM PEMBANGUNAN SEKTOR AIR BERSIH

Air bersih atau air minum sangat penting artinya bagi kehidupan manusia. Kajian global kondisi air di dunia yang disampaikan pada World Water Forum II di Den Haag tahun 2000, memproyeksikan bahwa pada tahun 2025 akan terjadi krisis air di beberapa negara. Krisis air dapat saja terjadi di

Indonesia apabila pemerintah dan perusahaan air minum tidak dapat secara maksimal mengelola aset utamanya.

Berbagai permasalahan yang dihadapi perusahaan air minum saat ini, seperti: tingginya tingkat kebocoran air yang diproduksi, kapasitas produksi yang belum terpakai, biaya operasional/pemeliharaan untuk menghasilkan air bersih setiap meter kubiknya masih lebih tinggi atau sama dengan harga jual air setiap meter kubiknya, belum dapat terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air minum bersih baik secara kuantitas maupun kualitas, konflik perebutan air baku yang melintasi dua atau lebih pemerintah daerah, adanya daerah yang tidak menyediakan pengaturan air baku, adanya penggundulan hutan di kawasan daerah aliran sungai, kesulitan keuangan, terbelit hutang yang cukup besar dan tidak mampu membayar hutang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, bahkan tidak sedikit dari perusahaan air minum yang ada, jika ditinjau dari posisi keuangan perusahaan sudah dalam keadaan pailit mencerminkan belum maksimalnya pengelolaan aset utama perusahaan air minum.

Dalam prinsip kelayakan pelayanan dalam pembangunan sektor air menekankan pada partisipasi masyarakat yang menjadi penentu dalam

keberlangsungannya. Keberhasilan penyediaan air bersih perkotaan banyak ditunjukkan oleh beberapa negara berkembang seperti di Brazil di salah satu kota bernama Porto Alegre berhasil melaksanakan manajemen penyediaan air bersih yang mempunyai dasar partisipasi masyarakat, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Salah satunya dalam hal penentuan anggaran dilaksanakan secara partisipatif. Di Indonesia, agar partisipasi masyarakat kota bisa mencapai hasil yang maksimal pemerintah kota Semarang dalam hal ini sebagai pelaksana memerlukan penerapan 10 prinsip dalam partisipasi masyarakat. Kesepuluh prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Komitmen

Dalam menentukan kebijakan mengenai penyediaan air bersih perkotaan diperlukan komitmen diantara semua pihak. Disini yang menjadi penentu adalah pimpinan dinas terkait, para tokoh politik dan masyarakat untuk bersama-sama membantu pengelolaan air serta penyediaannya untuk kelangsungan hidup warga. Kesadaran diantara pihak-pihak ini untuk bertukar informasi dan dukungan kepada seluruh pelaksana program.

2. Hak

Dalam proses partisipasi masyarakat, hak-hak untuk mendapatkan

informasi. Pemerintah harus menyediakan ruang untuk semua informasi yang ada. Baik itu kebijakan mengenai penggunaan air yang ada. Bagaimana ketersediaan air di kota. Untuk menjamin hak-hak masyarakat, semua harus menaati hukum yang ada. Kesadaran bagi semua pihak untuk dapat berperan dalam kebijakan penyediaan air perkotaan.

3. Kejelasan

Pembuatan kebijakan air ini baik dalam informasi, konsultasi antara pihak-pihak yang terlibat dan partisipasi aktif harus ada dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan air. Masyarakat sebagai input dan pemerintah sebagai pemegang kebijakan haruslah jelas untuk semua, baik proses maupun hasil yang didapat. Pemerintah dalam proses ini sebaiknya menghindari harapan yang salah oleh masyarakat mengenai kebijakan yang ada. Penyediaan informasi bagi masyarakat harus terus-menerus sehingga akan jelas dalam pengambilan keputusan.

4. Waktu

Waktu sangatlah menentukan keberhasilan suatu proses pembuatan keputusan. Partisipasi masyarakat berupa konsultasi dan partisipasi aktif harus ada dan diambil sebelum

pengambilan keputusan. Prosesnya harus seawal dan secepat mungkin.

5. Obyektif

Kebijakan yang dikeluarkan diharapkan dapat seobyektif mungkin. Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak. Tidak ada perlakuan istimewa bagi masyarakat yang punya uang banyak maupun kedudukan tinggi. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan standar bagi pelayanan informasi publik.

6. Sumber daya

Sumber daya yang dimiliki seperti keahlian, finansial, teknik yang tepat dibutuhkan dalam proses partisipasi. Dalam penyediaan air harus ada sumber daya yang mampu melaksanakan teknik penyediaan, keuangan yang cukup untuk infrastruktur air harus ada. Sehingga dibutuhkan prioritas dan alokasi sumber daya yang cukup.

7. Koordinasi

Untuk mengurangi resiko yang akan dihadapi dalam pembuatan keputusan harus ada koordinasi yang baik antar pihak. Inisiatif pemerintah untuk terus memberikan informasi kepada masyarakat dan meminta *feedback* dikonsultasikan.

8. Pertanggungjawaban

Dalam proses pembuatan kebijakan air baik dalam penetapan anggaran

harus terbuka dan transparan sehingga dalam pertanggungjawaban akan jelas. Pelaksana pelayanan air publik harus mempunyai kejelasan tugas yang dilaksanakan sehingga sistem tanggung jawab akan mudah.

9. Evaluasi

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dibutuhkan suatu proses evaluasi. Ini memudahkan pemerintah untuk mengetahui hal-hal apa saja yang belum mengakomodir partisipasi masyarakat.

10. Partisipasi aktif

Jika ada partisipasi aktif masyarakat akan ada dinamika dalam proses pengambilan keputusan. Mereka dapat secara nyata ikut dalam proses tersebut, dan memperkuat pendidikan bermasyarakat dan keahlian bermasyarakat.

Berdasarkan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan proses partisipasi masyarakat dalam permasalahan penyediaan air bersih diharapkan melalui mekanisme yang mendukung terlaksananya 10 prinsip partisipasi masyarakat. Pemerintah yang ingin membangun suatu pelayanan air publik membutuhkan mekanisme tersebut. Proses penentuan anggaran yang akan dibebankan kepada masyarakat harus mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Ketersediaan Air bersih sangat penting bagi upaya peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Secara umum dapat dikatakan bahwa air bersih memiliki nilai ekonomi yang penyediaannya memerlukan “ongkos produksi” karena cara mendapatkannya memerlukan teknologi pengolahan. Tidak pula dapat dipungkiri bahwa ketersediaan air merupakan hak bagi setiap warga masyarakat sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakannya. Hal ini diperkuat secara global, melalui tujuan pembangunan internasional (MGDs) bidang pengentasan kemiskinan dan keberlanjutan lingkungan. Dalam bidang kemiskinan pembangunan harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga pada tahun 2015 tidak ada penduduk yang memiliki penghasilan kurang dari 1 US\$ dan mengalami kelaparan, sementara dalam bidang keberlanjutan Lingkungan disebutkan salah satu targetnya adalah proporsi penduduk yang belum mendapatkan pelayanan air minum yang layak minum diharapkan berkurang setengahnya pada tahun 2015. Meskipun dua hal tersebut memiliki karakteristik unik tersendiri sehingga perlu dipisahkan, tetapi kalau diberlakukan bagi masyarakat miskin, dalam prakteknya sehari-hari keduanya memiliki keterkaitan yang sangat nyata dan jelas.

Bagi masyarakat miskin, biaya dan waktu untuk mengakses air minum memiliki korelasi yang tinggi dengan

penghasilan bulanan mereka. Beberapa kasus yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia menunjukkan bahwa biaya untuk mendapatkan air minum layak konsumsi bisa lebih besar dari 5 % dari total penghasilan sebulan. Seringkali mereka menghabiskan waktu lebih dari 3 jam untuk mendapatkan air layak minum. Artinya dengan standar 8 jam kerja per hari, 30% dari waktu mereka habis untuk mengakses air bersih. Jika mereka tidak bekerja, maka pada hari itu penghasilan mereka akan turun atau bahkan akan hilang

Kebijakan dasar dari upaya penyediaan air minum bagi masyarakat sudah dikeluarkan oleh pemerintah yaitu melalui UU No.7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Dikaitkan dengan upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan proporsi masyarakat yang belum mendapatkan air minum layak konsumsi, permasalahan yang akan dikaji lebih jauh adalah Bagaimana melakukan penilaian terhadap proporsi jumlah penduduk miskin yang belum mendapatkan pelayanan air minum yang layak untuk diminum. Kajian dilakukan dengan mengambil contoh kasus di Kota Semarang.

MASYARAKAT MISKIN DI KOTA SEMARANG

Jumlah masyarakat miskin di Kota Semarang berdasarkan data yang dikeluarkan BPS dapat dilihat pada tabel1.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Kota Semarang

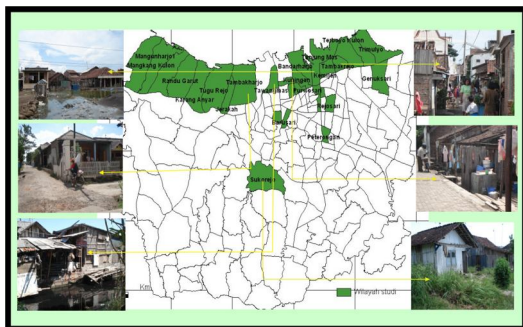
Tahun	Jumlah (Jiwa)
2002	103.400
2003	91.800
2004	79.000
2005	277.488
2006	341.324
2007	358.424

Sumber: BPS, 2007

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat miskin mengalami penurunan dari tahun 2002-2004 dan meningkat pada tahun 2005-2007. Peningkatan jumlah penduduk miskin ini disebabkan antara lain oleh adanya kenaikan harga BBM yang berdampak pula pada harga kebutuhan pokok sehingga banyak masyarakat yang jatuh ke dalam garis kemiskinan.

Masyarakat miskin perkotaan biasanya identik dengan permukiman kumuh dan liar, yang biasanya disebabkan karena ketidakmampuan mereka untuk tinggal ditempat yang lebih layak. Masyarakat secara umum tersebar di beberapa kecamatan di kota semarang Terdapat sekitar 42 lokasi permukiman kumuh yang ada di Kota Semarang (M. Agung Ridhlo: 2003). Di

sebagian wilayah tersebut rata-rata penghasilan masyarakat miskin paling rendah Rp.450.000 dan paling tinggi sebesar Rp.750.000 per bulan. Pekerjaan mereka adalah buruh dan tenaga upahan harian. Dari 42 titik lokasi tersebut secara administrasi tersebar di 33 wilayah Desa/Kelurahan (Eda Haryani, 2007). Karakteristik kawasan miskin di kota Semarang diperlihatkan dalam gambar 1. Selanjutnya kajian yang dilakukan Eda Haryani terhadap lokasi kelurahan tersebut, akan digunakan sebagai basis penilaian tingkat aksesibilitas air bagi masyarakat miskin di Kota Semarang.



Gambar 1. Karakteristik Kawasan Miskin di Kota Semarang

AKSESIBILITAS AIR MINUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA SEMARANG

Untuk mengetahui tingkat aksesibilitas air bersih bagi masyarakat miskin Kota Semarang dilakukan dengan analisis deskriptif kuantitatif, dimana hasil analisis ini akan dapat menggambarkan tingkat aksesibilitas air bersih bagi masyarakat miskin Kota

Semarang. Dalam analisis ini dilakukan pembobotan terhadap hasil analisis sebelumnya sehingga dapat diketahui tingkat akses air bersih bagi masyarakat miskin, apakah berada pada tingkatan akses optimal, menengah, akses dasar atau bahkan tidak ada akses. Pengelompokkan dan pembobotan tingkat akses ini menggunakan hasil penelitian Howard dan Bartram tahun 2003. Secara lengkap pembobotan yang dilakukan dalam kajian ini menggunakan tabel 2.

Tabel 2. Kriteria Pembobotan Penentuan Tingkat Akses Air Bersih

Kuantitas	Jarak	Waktu	Nilai
5 -19 l/org/hr	> 1000 m	> 30 menit	0
20-49 l/org/hr	100-1000 m	5-30 menit	1
50-99 l/org/hr	< 100 m	< 5 menit (1 rumah 1 kran)	2
> 100 l/org/hr	1 rumah lebih dari 1 kran	1 rumah lebih dari 1 kran	3

Sumber: Howard dan Bartram, dalam Eda 2007

Dari hasil pembobotan tersebut kemudian dikelompokkan kedalam tingkatan akses berdasarkan jumlah skor total yang diperoleh. Pengelompokkan ini dilakukan berdasarkan hasil penelitian Howard dan Bartram. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Pengelompokan Tingkat Akses Berdasarkan Total Skor

Tingkat Akses	Total Skor
Tidak ada akses	0
Akses Dasar	1 – 3
Akses Menengah	4 – 6
Akses Optimal	7 - 9

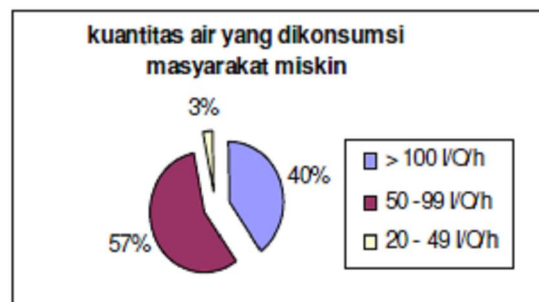
Semakin banyak jumlah penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan air. Hal itu berarti persediaan air juga semakin terbatas. Di satu sisi ada masyarakat yang kesulitan memperoleh air bersih untuk kehidupan sehari-hari, sementara di sisi lain terdapat penggunaan air secara berlebihan tanpa memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang. Masyarakat perkotaan memanfaatkan air untuk segala jenis kebutuhan. Mulai dari kebutuhan minum, mandi, memasak, mencuci, dan kebutuhan lainnya seperti menyiram tanaman. Meledaknya penduduk kota beberapa tahun terakhir memunculkan permasalahan baru terhadap akses semua masyarakat terhadap air. Jika beberapa tahun yang lalu dapat mengkonsumsi air secara berlebih, hal ini tidak dapat didapatkan saat ini karena semakin banyak orang yang membutuhkan air.

Tingkat aksesibilitas air bersih bagi masyarakat miskin akan dinilai dari kuantitas air yang dikonsumsi, jarak sumber air ke rumah masyarakat dan waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan air. Dari data yang

diperoleh dapat ditunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat miskin di kota Semarang telah mampu mengakses air bersih dalam jumlah 50 – 59 l/O/h. Hanya sekitar 3 % yang tidak mampu mengakses air bersih diatas 50 /O/h. Pemenuhan air masyarakat miskin Kota Semarang secara detail dapat dikelompokkan kedalam beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. Pengelompokan Tingkat Konsumsi Air Bersih Masyarakat Miskin

Kuantitas (l/org/hr)	Jumlah Kelurahan	Skor
< 19	0	0
20-49	1	1
50-99	17	2
> 100	12	3

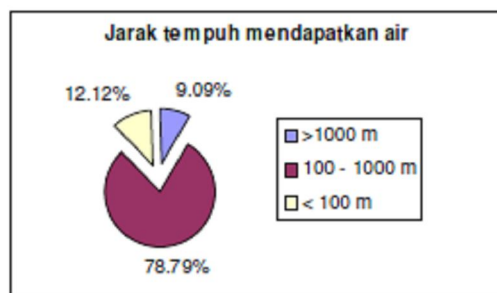


Gambar 2. Kuantitas Air yang dikonsumsi oleh masyarakat miskin Kota Semarang

Analisis dan kajian terhadap jarak yang ditempuh untuk mendapatkan air bersih secara umum dapat diperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat miskin menempuh jarak antara 100 – 1000 meter untuk mendapatkan air minum layak konsumsi. Hanya sekitar 9% yang perlu berjalan lebih dari 1000 m. Penilaian terhadap kondisi ini ditunjukkan dalam table berikut.

Tabel 5. Jarak yang Harus Ditempuh Masyarakat Miskin Kota Semarang untuk Mendapatkan Air Bersih

Jarak Skor	Jumlah	Kelurahan
> 1000 m	0	3
100-1000 m	1	4
< 10 m	2	26
1 rumah lebih dari 1 kran	3	0



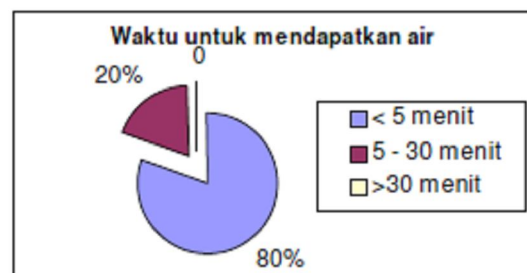
Gambar 3. Jarak Tempuh untuk Mendapatkan Air

Dilihat dari segi waktu, masyarakat miskin di kota semarang mayoritas sekitar 80% hanya mengeluarkan waktu maksimal 5 menit untuk mendapatkan air bersih. Sementara hanya 20% mereka menghabiskan waktu antara 5 – 30 menit untuk mendapatkan air bersih. Penilaian dari segi waktu untuk mendapatkan air tersebut menunjukkan bahwa tingkat aksesibilitas dari sisi total waktu yang dikeluarkan untuk mengakses air dalam kategori tinggi. Oleh karena itu dalam sudut pandang ini sebenarnya tidak ada persoalan. Dilihat dari Kuantitas air yang dapat dikonsumsi, jarak yang ditempuh untuk mendapatkan air dan kemudian waktu untuk mendapatkan air nampak tingkat aksesibilitas air bagi masyarakat miskin dalam tingkatan menengah.

Masyarakat mampu mengonsumsi air dalam jumlah yang lebih dari 50 l/h, kemudian jarak yang ditempuh untuk mendapatkan tidak lebih dari 1 km. Kemudian mayoritas dapat diperoleh kurang dari 5 menit. Artinya masyarakat miskin tidak mengalami kesulitan mengakses air.

Tabel 6. Waktu yang Diperlukan untuk Mendapatkan Air Minum

Waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan air	Jumlah Kelurahan	Skor
> 30 menit	0	0
5-30 menit	6	1
< 5 menit	24	2
1 rumah lebih dari 1 kran	0	3



Gambar 4. Waktu yang Dikeluarkan untuk Mendapatkan Air

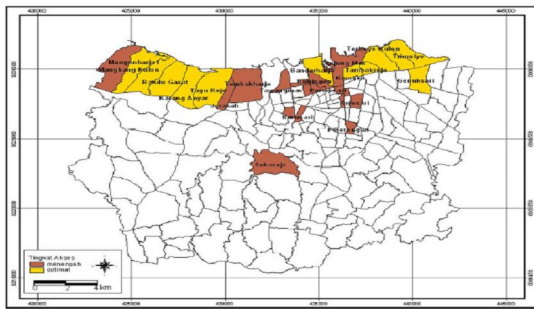
Meskipun aksesibilitas air berada pada tingkatan menengah tetapi persoalan penyediaan air minum layak konsumsi masih perlu ditelaah lebih mendalam apabila dikaitkan Tetapi jika dikaitkan dengan biaya yang harus mereka keluarkan untuk mendapatkan air tersebut, maka persoalannya lain. Rata-rata pengeluaran masyarakat miskin untuk air bersih tiap bulannya adalah 5,2%. Hal ini sesuai dengan hasil

penelitian *Water Academy* yang mengungkapkan bahwa air minum akan dianggap mahal jika pengeluaran melampaui 3% dari pendapatan rata-rata penduduk (Water Academy dalam Mungkasa, 2006).

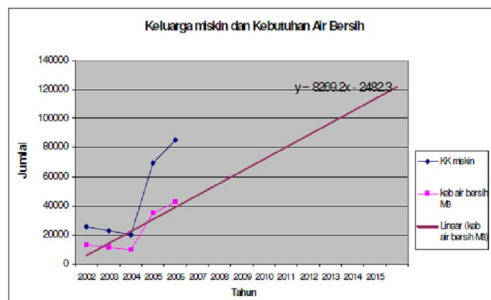
Jika dibandingkan dengan tarif air yang diberlakukan PDAM masyarakat miskin harus membayar 10 kali lipatnya. Rata-rata konsumsi air bersih masyarakat miskin Kota Semarang setiap bulannya adalah sekitar 14 m³ sehingga tergolong dalam kelas rumah tangga 1 dengan tingkat pemakaian antara 11-20 m³. Rata-rata harga yang harus dibayar masyarakat miskin adalah Rp.9.235,-/m³. Sedangkan untuk kelas Rumah Tangga 1 dengan tingkat pemakaian antara 11-20 m³, tarifnya hanya Rp.850/m³ (Litbang PDAM Kota Semarang, 2006). Dengan demikian dapat dilihat bahwa masyarakat miskin harus membayar 10 kali lipat dari tarif air yang diberlakukan PDAM. Bahkan untuk kelas rumah tangga 5 atau yang merupakan perumahan mewah sekalipun hanya membayar Rp.3340,-/m³ (Litbang PDAM Kota Semarang, 2006). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Bank Dunia di beberapa kawasan miskin di Indonesia yang menunjukkan bahwa masyarakat miskin membayar jauh lebih mahal (sampai 30 kali lipat) dari masyarakat kaya untuk mendapatkan layanan air bersih.

Tabel 7. Temuan Tingkat Akseibilitas Air Bersih bagi Masyarakat Miskin Kota Semarang

Analisis	Hasil	Alasan	Kesimpulan
Kuantitas air yang dikonsumsi masyarakat miskin	Jumlah kuantitas air yang dikonsumsi masyarakat miskin Kota Semarang relatif sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat miskin setiap harinya.	Dilihat dari kuantitas air yang digunakan, 40% masyarakat miskin tingkat konsumsi airnya lebih dari 100 l/org/hr dan 57% masyarakat miskin konsumsi airnya antara 50-99 l/org/hr.	Berdasarkan kuantitas air yang dikonsumsi masyarakat miskin Kota Semarang pada umumnya telah berada pada akses menengah.
Jarak yang harus ditempuh untuk mendapatkan air bersih	Pada umumnya jarak yang harus ditempuh masyarakat miskin Kota Semarang untuk mendapatkan air bersih tidak terlalu jauh. Rata-rata masyarakat miskin sudah langsung mendapatkan air di rumah mereka.	Sebesar 87% masyarakat miskin mendapatkan air hanya dengan jarak < 10 m.	Ditinjau dari jarak yang harus ditempuh untuk mendapatkan air bersih, masyarakat miskin Kota Semarang sudah berada pada tingkatan akses menengah.
Waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan air bersih	Pada umumnya masyarakat miskin tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk mendapatkan air. Bagi yang terlayani sumur artesis dan sumur dalam telah terdapat 1 kran tiap 1 rumah, sedangkan bagi yang beli air, penjual langsung mengantarkannya kerumah-rumah.	Sebesar 80% masyarakat miskin Kota Semarang hanya membutuhkan waktu < 5 menit untuk mendapatkan air.	Dari waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan air, masyarakat miskin Kota Semarang sudah berada pada akses menengah.



Gambar 5. Peta Sebaran Tingkat Aksesibilitas Air Bagi masyarakat Miskin Kota Semarang



Gambar 6. Kecenderungan Kebutuhan Air Bagi Masyarakat Miskin dikaitkan dengan Jumlah Keluarga Miskin di Kota Semarang sampai dengan tahun 2015

MEKANISME PENYELESAIAN PELAYANAN AIR BERSIH BAGI MASYARAKAT MISKIN

Dari uraian diatas kiranya ada beberapa mekanisme secara teknis dalam penyelesaian pengadaan dan teknik penyaluran air bersih yang tepat serta dapat menjangkau sebagian besar masyarakat (khususnya masyarakat miskin) di kota Semarang. Beberapa mekanisme yang dapat ditempuh oleh pemerintah kota Semarang adalah sebagai berikut :

a. Fasilitasi

Proses partisipasi membawa berbagai macam masalah dan berkumpulnya kelompok stakeholder harus diorganisasi, diatur, dan

difokuskan dan didukung. Pemerintah sebaiknya menggunakan mekanisme ini untuk mengumpulkan seluruh informasi, ide, gagasan yang ada. Gagasan tersebut dikumpulkan untuk digarap dan tidak perlu ada pembahasan masalah di proses fasilitasi. Masyarakat dengan bebas dapat mengungkapkan apa yang dia harapkan untuk memenuhi kebutuhan terhadap air bersih. Proses fasilitasi menciptakan kondisi dan lingkungan yang menunjang partisipasi publik. Pemerintah mengundang masyarakat yang ingin ikut dalam proses tersebut, prinsip hak dan kejelasan informasi sangat dibutuhkan. Beberapa pertimbangan seluruh masyarakat yang punya keinginan akses air bersih lancar akan ikut dalam proses ini, karena dalam mekanisme ini cara yang ditempuh sederhana :

- Setiap ide yang diberikan dicatat baik siapapun pihak yang mengajukan ide tersebut.
- Tidak ada diskusi dan evaluasi dalam mengalirnya ide atau gagasan, sehingga rakyat kecilpun tidak sungkan untuk 'ber-ide'. Ketakutan masyarakat kecil dalam diskusi akan menghambat diskusi sehingga fasilitasi tidak terjadi proses tersebut masyarakat akan nyaman dalam mekanisme tersebut.

- Jumlah gagasan yang dipentingkan bukan kualitas gagasannya.

b. Konsultasi kota

Tahap ini menghadirkan para stakeholder yang berasal dari berbagai kelompok untuk membahas permasalahan air bersih perkotaan. Setelah didapatkan gagasan dari masyarakat pengguna air bersih akan diolah dan didiskusikan untuk mendapatkan suatu keputusan untuk sistem pelayanan air bersih bagi masyarakat kota. Mekanisme konsultasi kota memungkinkan terjadinya *sharing* informasi, membangun konsensus, dan partisipasi penuh para stakeholders. Dalam proses konsultasi kota beberapa hal yang dilakukan adalah :

- Pandangan umum mengenai permasalahan penyediaan air bersih, bagaimana isi, kerangka kerja, tujuan yang akan dicapai dalam konsultasi kota ini.
- Identifikasi masalah yang ada. Air bersih yang digunakan untuk kelangsungan hidup warga kota membutuhkan penanganan yang serius pada teknik dan proses pengadaannya dengans semakin terbatasnya sumber air perkotaan.
- Metode yang akan dilaksanakan untuk mengatasi penyediaan air bersih, apa saja hal yang dibutuhkan dan bagaimana penyediaan air ditangani oleh

publik sendiri adalah lebih mendukung kepada proses partisipasi masyarakat.

- Diskusi kerja masing-masing pihak yang terlibat. Agar partisipasi masyarakat tidak hanya ada dalam pengambilan kebijakan dan ada juga saat proses penyediaanya, maka anggaran yaitu tarif bisa mengakomodir kepentingan rakyat kecil. Masyarakatpun yang mempunyai kesadaran untuk ikut mengawasi penyaluran air bersih.
- Kesimpulan dan keputusan yang diambil harus sesuai dengan apa yang didiskusikan bersama, partisipasi publik menentukan apa yang diharapkan untuk kelangsungan hajat hidup warga perkotaan

KESIMPULAN

Prinsip kelayakan pelayanan dalam pembangunan sektor air bersih adalah : komitmen, hak, kejelasan, waktu, obyektif, sumber daya, koordinasi, pertanggungjawaban, evaluasi dan partisipasi aktif. Kebutuhan akan air di masa mendatang akan terus mengalami peningkatan, sementara tingkat penghasilan masyarakat miskin sulit untuk diprediksikan. Nilai tingkat aksesibilitas air minum level menengah belum merepresentasikan biaya mengakses. Apakah memang secara keseluruhan aksesibilitas menengah

tersebut dibayar dengan total pengeluaran untuk air minum kurang dari 3 % dari total penghasilan mereka. Suatu hal yang belum dapat dicapai oleh Kota Semarang. Oleh karena itu perlu adanya mekanisme secara teknis dalam penyelesaian pengadaan dan teknik penyaluran air bersih yang tepat serta dapat menjangkau sebagian besar masyarakat (khususnya masyarakat miskin) di kota Semarang. Beberapa mekanisme yang dapat ditempuh yaitu : proses fasilitasi dan konsultasi kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, Alison and Tony Lloyd Jones. 2002. "Spatial Planning Access and Infrastructure". In Carole Rakodi (ed.) *Urban Livelihood*. London: Earthscan.
- Ridhlo, Muhammad Agung. 2002. Karakteristik Kemiskinan Perkotaan pada Permukiman Kumuh dan Liar Kota Semarang." Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Howard, Guy dan Jamie Bartram. *Domestic Water Quantity, Service Level and Health*. World Health Organization 2003.
- Anwar, Alizar. 2004. *Pelayanan Air Minum Wilayah Perkotaan Indonesia*. Disampaikan dalam Juornalist Workshop on Water Issues 5-8 desember 2004. Badan regulator pelayanan air minum Jakarta.
- Cahyat, Ade. Bagaimana Kemiskinan Diukur? Beberapa model perhitungan kemiskinan di Indonesia. November 2004. Governance Brief. Center For International Forestry Research.
- Marina, Ira. 2005. "Keterjangkauan dan Kelangsungan Pengelolaan Layanan Air Bersih di Perumahan Beringin Asri Semarang." Tugas Akhir tidak diterbitkan, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.
- Reclaiming Public Water. 2005. *Cerita sukses, perjuangan dan visi dari berbagai negara*. AMRTA Institute for Water Literacy.
- Santoso, Hamong. 2006. "Kebijakan Infrastruktur Air Bersih dan Kemiskinan." *Jurnal Percik*, Edisi April, hal. 30
- Mungkasa, Oswar. 2006. "Pembangunan Air Minum dan Pembangunan." *Jurnal Percik*, Edisi Oktober 2006, hal. 18-20.
- Profil PDAM Tirta Moedal Kota Semarang*. Litbang PDAM Tirta Moedal Kota Semarang, 2006.
- Maryono. 2007. *Menilai Aksesibilitas Air Minum di Kota Semarang*. Jurnal PRESIPITASI Vol. 3 No.2 September 2007, ISSN 1907-187X